

LAPORAN TAHUNAN 2019



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan pihak – pihak yang terkait. Laporan ini juga dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*, khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Laporan tahunan ini memuat Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh dinas, Indikator Kinerja OPD, serta Indikator Kinerja Program dari 2 urusan, yaitu sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja baik dari pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan, maupun dari sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Namun untuk aspek *input*, *output* serta *outcome* dalam pengukuran evaluasi kinerja kegiatan baru menggunakan aspek keuangan saja dan belum dikaji melalui aspek ekonomi, efisiensi serta efektifitas.

Hasil Pengukuran indikator kinerja Tahun 2019 rata-rata tercapai. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2019 berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari total alokasi anggaran belanja langsung Rp.3.779.574.897,00 mampu terealisasi Rp.3.628.752.788,00 atau 96,00%. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan.

Namun juga ada beberapa indikator yang belum dapat tercapai dengan adanya beberapa permasalahan yang ada. Untuk itu keberpihakan dan kerjasama dengan berbagai elemen dan *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Wates,

2019

Kepala Dinas

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19630527 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran SKPD	2
C. Program Kerja	13
D. Sasaran	14
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019.....	16
A. Urusan Sosial	16
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	31
BAB III PENUTUP	51
LAMPIRAN	
LAMPIRAN LAMPIRAN IKK 3.2.....	52
LAMPIRAN LAMPIRAN IKK 3.3.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

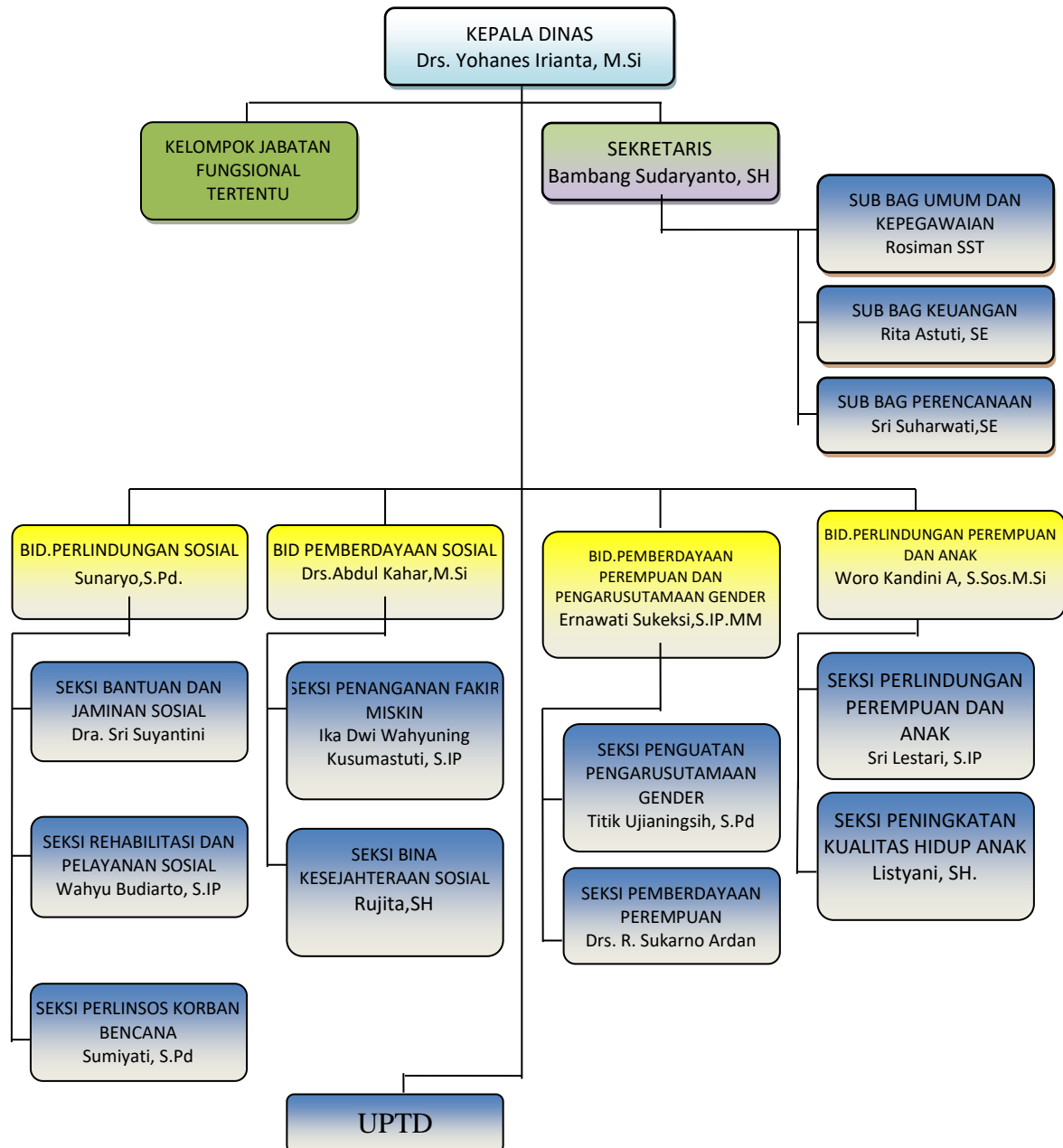
Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2016
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

B. Gambaran SKPD

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sebagaimana bagan berikut :



Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 2) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial
- d. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
- 1) Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
- 1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan sosial;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan sosial;
- c. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan

Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
- c. melaksanakan kegiatan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan sosial korban bencana alam/sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial;
- b. menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- c. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam/sosial;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial

Seksi Penanganan Fakir Miskin

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kearsipan dinamis.

Seksi Bina Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
- b. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender

- (1) Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penguatan pengarusutamaan gender.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas hidup anak dan peningkatan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. menyelenggaraan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

(1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

(1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

1. Sumber Daya Aparatur

- a. Jumlah pegawai menurut pendidikan :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Organisasi	SD	SLT P	SLTA	D II/D III/D IV	S 1	S 2	Jml
1	Kepala	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	4	2	3	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	2	-	5	1	8
4	Bidang	-	-	1	-	3	1	5

	Pemberdayaan Sosial							
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	2	1	2	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	1	1	1	2	5
Jumlah		0	0	10	4	14	7	35

b. Jumlah pegawai menurut golongan :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Tahun 2019

No	Organisasi	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jml
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	6	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	6	1	7
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	3	1	4
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	5	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	3	2	5
7	JFT	-	-	2	-	2
Jumlah		0	3	25	7	35

c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2019

NO	ORGANISASI	JFU	JFT	ESELON	JUMLAH
----	------------	-----	-----	--------	--------

				II	III	IV	
1	Kepala	-	-	1			1
2	Sekretariat	6	-	-	1	3	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	3	1	-	1	3	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	1	1	-	1	2	5
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	3	-	-	1	2	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2	-		1	2	5
Jumlah		15	2	1	5	12	35

d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan :

Tabel 1.4

Jumlah Pejabat yang telah memenuhi Syarat Kepangkatan Tahun 2019

No	Organisasi	Pejabat Memenuhi Syarat Kepangkatan	Jumlah Jabatan yang Ada
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	4	4
3	Bidang Perlindungan Sosial	4	4
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	3	3
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	3	3
6	Bidang Prlindungan	3	3

Perempuan dan Anak		
Jumlah	18	18

e. Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan :

Tabel 1.5

Jumlah Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun 2019

No	Organisasi	Pejabat Memenuhi Syarat Diklatpim	Jumlah Jabatan yang Ada
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	4	4
3	Bidang Perlindungan Sosial	3	4
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	3
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	3	3
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2	3
Jumlah		15	18

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa belum semua Pejabat mengikuti Diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan.

f. Jumlah pejabat yang harus ada :

Tabel 1.6

Jumlah Pejabat Struktural yang Harus Ada Tahun 2019

No	Organisasi	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1	Kepala	Kepala Dinas	Drs. Yohanes Irianta, M.Si
2	Sekretariat	Sekretaris	Bambang Sudaryanto, SH
		Kepala Subag. Perencanaan	Sri Suharwati, SE
		Kepala Subag. Keuangan	Rita Astuti, SE
		Kepala Subag. Umum dan kepegawaian	Rosiman, SST
		Kepala Bidang	Sunarya, S.Pd
3	Bidang Perlindungan Sosial	Kasi. Bantuan dan Jaminan Sosial	Dra. Sri Suyantini
		Kasi. Rehabilitasi dan Pelayanan	Wahyu Budiarto,

		Sosial	S.IP
		Kasi. Perlindungan Sosial Korban Bencana	Sumiyati, S.Pd
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang	Drs. Abdul Kahar, M.Si
		Kasi. Penanganan Fakir Miskin	Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti, S.IP
		Kasi. Bina Kesejahteraan Sosial	Rujita, SH
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Kepala Bidang	Ernawati Sukeksi, S.IP.,MM
		Kasi. Penguatan Pengarusutamaan Gender	Titik Ujianingsih, S.Pd
		Kasi. Pemberdayaan Perempuan	Drs. R. Sukarno Ardan
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kepala Bidang	Woro Kandini Andayani, S.Sos.,MSi
		Kasi. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Sri Lestari, S.IP
		Kasi. Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Listyani, SH.,M.KN

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7.

Jumlah Asset yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No	Nama Barang / Prasarana	Jumlah / Unit	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Meja	57 bh	52 bh	5 bh
2	Kursi kayu	11 bh	7 bh	4 bh
3	Kursi tamu	3 set	3 set	-
4	Almari Kayu	7 bh	4 bh	3 bh

5	Kursi lipat	65 bh	58 bh	7 bh
6	Papan board	4 bh	3 bh	1 bh
7	Meja computer	2 bh	2 bh	-
8	Filling besi/Cabinet	4 bh	4 bh	-
9	Filing Daichi/Brodher	2 bh	2 bh	-
10	Filing Kayu	1 bh	1 bh	-
11	Kursi Besi	3 bh	3 bh	-
12	Rak kayu	4 bh	2 bh	2 bh
13	Computer	11 bh	11 bh	-
14	Printer	16 bh	16 bh	-
15	AC	8 bh	8 bh	-
16	Kipas Angin	6 bh	6 bh	-
17	Laptop	6 bh	4 bh	-
18	Jam Dinding	3 bh	3 bh	-
19	Proyektor	4 unit	3 unit	1 unit
20	Faximile	1 unit	1 unit	-
21	Sepeda Motor	7 unit	7 unit	-
22	Mobil	4 unit	4 unit	-
23	Scanner	1 bh	1 bh	-
24	Wireless	4 bh	4 bh	-

C. Program Kerja

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah :

1. Urusan Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

- 1) Peningkatan Pelayanan Distribusi Rastra
- 2) Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial bagi PMKS
- 4) Peningkatan Pelayanan PKH
- 5) Peningkatan Kapasitas PSKS
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

b. Program Perlindungan Sosial

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan PMKS
 - 2) Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana
 - 3) Penjangkauan dan Pelayanan Sosial
 - c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
 - 2) Penyediaan Jasa Keuangan
 - 3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
 - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
 - f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
 - 1) Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
 - 2) Peningkatan Peran Wanita
 - 3) Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - 4) Penguatan Pengarusutamaan Gender
 - 5) Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak
 - b. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 1) Pembinaan Kabupaten Layak Anak
 - 2) Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah
 - 3) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - 4) Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

D. Sasaran

Target dan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 adalah :

Tabel 1.8
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2017-2022 (Perubahan)

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja	
			2019	
			Target	Capaian
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100
2	Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	%	100	100
3	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	%	100	100
4	Indeks Perlindungan Sosial	%	84,00	84,14
5	Indeks Pemberdayaan Sosial	%	40,06	43,30
6	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan PUG	%	61,73	65,81
7	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	68,63	68,63

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN 2019

A. Urusan Sosial

1. Realisasi Fisik, Keuangan dan SDM

1)	Program Pemberdayaan Sosial		
	a)	Peningkatan Pelayanan Distribusi Rastra	
		Masukan(<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 188.034.375,00 realisasi Rp 182.123.300,00 SDM: 11 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Koordinasi dan monev bantuan pangan 12 kali
			: Laporan distribusi bantuan pangan 12 dokumen
		Hasil(<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 1,48 % terhadap capaian Indeks Pemberdayaan Sosial
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Peningkatan penanganan PMKS
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya perlindungan PMKS
	b)	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 93.075.000,00 realisasi Rp 86.006.563,00 SDM: 10 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Database KUBE 1 dokumen
			: Pelatihan KUBE 4 kali
			: Monitoring dan Evaluasi KUBE dan UEP 30 kali
			: Bantuan Sosial kepada PMKS 50 keluarga
		Hasil(<i>outcomes</i>)	: Dukungan 5,04 % terhadap capaian Indeks pemberdayaan sosial
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Meningkatnya kesejahteraan PMKS
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kesejahteraan PMKS
	c)	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial Bagi PMKS	
		Masukan(<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 135.944.650,00 realisasi Rp 129.853.900,00 SDM: 8 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Hari Lanjut Usia (HALUN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 600 orang
			: Jumlah kerjasama pelayanan PMKS (Panti dan LKSA) 23 lembaga

			Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) 1 kali
			Pelayanan Jamkesmas Terpadu 1 kali
			Pengiriman Kontingen Hari Disabilitas Internasional 1 kali
			Koordinasi Kabupaten Inklusi 24 kali
		Hasil(<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 2,09 % terhadap Capaian Indeks Pemberdayaan Sosial
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Meningkatnya penanganan PMKS
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya Perlindungan bagi PMKS
	d)	Peningkatan Pelayanan PKH	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 79.785.725,00 realisasi Rp 79.427.100,00 SDM: 118 orang
		Keluaran (<i>outputs</i>)	: Sosialisasi PKH 1 kali
			: Buku data penerimaan bantuan lanjut usia dan penyandang disabilitas 2 dokumen
			: Pelayanan Sosial kepada PKH 12 bulan
			: Koordinasi PKH 7 kali
		Hasil(<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 6,48 % terhadap Capaian Indeks Pemberdayaan Sosial
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Meningkatnya penanganan PMKS
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Menurunnya angka kemiskinan
	e)	Peningkatan Kapasitas PSKS	
		Masukan(<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 98.093.150,00 realisasi Rp 91.094.100,00 SDM: 9 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Lomba kreativitas bagi PSKS 1 kali
			: Pembinaan LKS, WKSBM, Orsos, TKSK, PSM, KUBE, dan Karang Taruna 7 Lembaga
			: Koordinasi PSKS 30 kali
			: Pemberian hadiah vbagi PSKS yang berprestasi 5 lembaga
			: Fasilitasi peserta HKSNI 100 orang
		Hasil(<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 5,33% Terhadap Capaian Indeks Pemberdayaan Sosial
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Meningkatnya penanganan PMKS

		Dampak (<i>impacts</i>)	: Menurunnya angka kemiskinan
	f)	Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 413.238.100,00 realisasi Rp 412.151.500,00 SDM: 10 orang
		Keluaran (<i>outputs</i>)	: Dokumen data kemiskinan 1 dokumen
			: Koordinasi Tingkat Kecamatan 24 kali
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 20,17% terhadap capaian Indeks pemberdayaan sosial
		Manfaat (<i>benefits</i>)	: Meningkatnya kesejahteraan PMKS
		Dampak (<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kesejahteraan PMKS
2) Program Perlindungan Sosial			
	a)	Peningkatan Kualitas Pelayanan PMKS	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 1.330.779.906,00 realisasi Rp 1.242.771.584,00 SDM: 54 orang
		Keluaran (<i>outputs</i>)	: Fasilitasi pendamping KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 88 orang
			: Mekanisme pemberian bantuan 5 kali
			: Pelayanan pada PMKS 12 bulan
			: Bantuan bagi PMKS 8 jenis
			: Persiapan penyaluran bantuan pangan tahun 2020 1 paket
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan 47,91% terhadap capaian indeks perlindungan sosial
		Manfaat (<i>benefits</i>)	: Meningkatnya penanganan PMKS
		Dampak (<i>impacts</i>)	: Meningkatnya perlindungan bagi PMKS
	b)	Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 85.984.300,00 realisasi Rp 85.900.800,00 SDM: 10 orang
		Keluaran (<i>outputs</i>)	: Jumlah korban bencana yang dibantu 400 KK
			: Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan 5 kemitraan
			: Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia 1 paket
			: Terselenggaranya apel siaga TAGANA 1 kali
			: Jumlah TAGANA yang aktif 155 orang

			Operasional posko siaga bencana 12 bulan
			Jumlah KSB (Kampung Siaga Bencana) yang dibina 4 desa
		Hasil(<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 3,91 % terhadap capaian indeks perlindungan sosial
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Peningkatan kesejahteraan PMKS
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kesejahteraan PMKS
	i)	Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 25.023.350,00 realisasi Rp 24.998.100,00 SDM: 17 orang
		Keluaran <i>outputs</i>)	: Jumlah PGOT (Pengenggis, Gelandangan, Orang Terlantar) yang dilayani 100%
		Hasil(<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 1,17% terhadap capaian indeks perlindungan sosial
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Meningkatnya keberdayaan PMKS
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Menurunnya angka kemiskinan

2. Realisasi Program

Realisasi program tercantum dalam Evaluasi hasil RKPD sebagaimana tersaji dalam Tabel Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 sebagai berikut :

3. Realisasi Urusan

a. Capaian Urusan yang ditargetkan Tahun 2019

1) Indikator Kinerja Daerah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah. salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersediannya data yang akurat dan tepat sasaran. Karakteristik rumah tangga orang miskin adalah yang memiliki pendidikan rendah, dalam kehidupan minim listrik, sarana sanitasi dan air bersih yang tidak memadai, pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.

Di Kabupaten Kulon Progo, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 20,03 dan tahun 2018 menjadi 18,30 dengan demikian angka kemiskinan mengalami penurunan 1,73 persen dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, angka kemiskinan sebesar 17,39 yang artinya turun 0,91 persen. Nilai-nilai kearifan lokal berupa budaya gotong royong dimasukan dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan melalui beberapa program antara lain: beras untuk keluarga miskin (Rastra), rumah tidak layak huni (RTLH), dan program keluarga harapan (PKH). Selain itu, Program pengentasan kemiskinan dari Pemkab Kulon Progo yakni bedah rumah, program orang tua asuh, program padat karya dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB).

Kedua tantangan ini, yakni penurunan kemiskinan yang melambat dan ketimpangan yang meningkat, akan menjadi tantangan paling penting bagi Pemerintah saat ini. Meningkatnya ketimpangan juga membuat mereka yang miskin lebih sulit lagi untuk keluar dari kemiskinan. Peningkatan anggaran untuk program-program jaring pengaman sosial (*social safety net*) akan membantu meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, gizi yang lebih baik dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk lepas dari kemiskinan.

2) Indikator Kinerja OPD

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
 RPJMD Tahun 2017-2022 (Perubahan)

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja	
			2019	
			Target	Capaian
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100
2	Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	%	100	100
3	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	%	100	100
4	Indeks Perlindungan Sosial	%	84,00	84,14
5	Indeks Pemberdayaan Sosial	%	40,06	43,30

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Tabel 2.2

Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019

Baru

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial	50.554	50.688
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial	65.536	65.536
3.	Jumlah tagana yang aktif (piket, apel dan Verifikasi Akhir Tahun)	155	155
4.	Jumlah tagana	155	155
	Capaian Indikator Kinerja	84.00	84.14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019 tercapai 84,14 melampau dari target yang ditetapkan sebesar 84,00 atau tingkat capaian dari realisasi terhadap target 100.27%. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Jaminan Sosial dari target 50.554 tercapai 50.688. Pencapaian

tersebut dari jumlah PMKS yang telah mendapatkan bantuan sosial dan BPNT (bantuan pangan non tunai) bantuan berupa barang yaitu beras, dan lele.

TAGANA (Taruna Siaga Bencana) telah terbentuk Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2007 mereka adalah relawan yang membantu dalam mengevakuasi dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Jumlah Tagana yang ada sebanyak 155 orang Bencana alam memerlukan perhatian yang ekstra dan serius, karena bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya sehingga diperlukan manajemen penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana. Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo telah terjadi sebanyak 89 kejadian bencana (tanah longsor 28 titik kejadian, angin ribut 38 titik kejadian, kebakaran 13 titik kejadian, banjir 1 kejadian). kejadian bencana tersebut semuanya telah diberikan bantuan. Selain bencana diatas juga terjadi bencana kekeringan yang terjadi di 9 kecamatan yaitu di Kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Kokap dan Kecamatan Sentolo, Lendah, Wates. Dikarenakan bencana kekeringan makin meluas maka pemerintah daerah pada bulan september menerbitkan SK Tanggap Darurat kekeringan dengan Nomor 311/B/2019. Penyaluran air bersih telah dilakukan dengan droping air dengan total 993 tangki air @5000 liter untuk dimanfaatkan kepada 27.583 jiwa.

Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019

Baru

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	8.849	9.565
2.	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	22.090	22.090
	Indeks Pemberdayaan Sosial	40.06	43.30

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 mencapai 43,30 dari target yang ditetapkan sebesar 40,06. PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis sebesar 8.849 target di tahun 2019 dan realisasi 2019 sebesar 9.565. sehingga realisasi melampau target. Akumulasi KUBE tahun sebelumnya yang ada sebanyak 8.576 orang ditambah dengan Pemberdayaan melalui KUBE yang bersumber dari APBD pengembangan 1 kelompok (10 orang), APBN

Pengembangan 20 kelompok (200 orang), dana Dekonsentrasi 60 kelompok (600 orang) dan BKK graduasi 179 KPM. sehingga realisasi tahun 2019 sebanyak 9.565 orang.

Berbagai program dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten serta sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2019 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2019

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Satuan
A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
1	APBD Kabupaten	Bansos LUT	719	orang
		RTLH bazda	32	kk
		RTLH CSR	100	kk
		Bansos Balita	97	orang
		Bansos CB/CS	193	orang
		Bansos Psikotik	1	orang
		Bansos PMKS	126	orang
		Bansos Panti (23)	1.054	orang
		Jenazah Terlantar	4	orang
		Permakanan Bencana	762	jiwa
		Penderes	8	orang
2	APBD Propinsi	Kursi Roda	47	orang
		Alat Bantu Lainnya	87	orang
3	APBN	ASLUT	85	orang
		ASPD	31	orang
		RASTRA/BPNT	49.515	KPM
		PKH (Program Keluarga Harapan)	30.006	KPM
		RTLH APBN	70	kelompok
		JUMLAH (A)	82.937	
B. Pemberdayaan Sosial				
1	APBD Kabupaten	Bansos KUBE pengembangan 1(10 org)	10	orang
2	APBD Propinsi	BKK UEP Graduasi PKH	179	KPM
3	APBN	UEP LUT	85	orang
		KUBE APBN	200	orang
		KUBE Dekonsentrasi (Luncuran)	600	jiwa
		JUMLAH (B)	1.074	orang
		JUMLAH (A+B)	84.011	

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa Tahun 2019 Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar telah tersalurkan kepada 82.937 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi maupun dari dana APBN. Jumlah Pemberdayaan sosial yang telah tersalurkan Tahun 2019 sebanyak 1.074 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi dan APBN. Seluruh pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang telah disalurkan melalui dana APBD, Dekonsentrasi dan dana APBN adalah 84.011 jiwa.

Menurut Kementerian Sosial RI saat ini tercatat ada 5 jenis PSKS di Kabupaten Kulon Progo yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. *Pekerja Sosial Profesional*, adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Termasuk dalam kategori ini adalah Pekerja Sosial Masyarakat yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Pengurus 15 orang, Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKSK: 88 orang, Operator dan Pendamping PKH: 57 orang, Fasilitator dan Supervisor SLRT: 94 orang, Pendamping TKSK: 12 orang (semuanya aktif melaksanakan ketugasannya masing-masing).
2. *Taruna Siaga Bencana (Tagana)*, adalah orang/relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan registrasi ulang Tagana dan diperoleh jumlah sebanyak 155 orang yang telah melakukan registrasi.
3. *Organisasi Sosial*, adalah suatu lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial. Termasuk di dalamnya adalah 23 panti, 30 WKSMB, dan 22 Orsos seluruhnya aktif. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian Orsos/LKS sebagai berikut:

Tabel 6.5
 Hasil Pendataan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 Tahun 2019

No	Nama LKS/Orsos	Alamat	Kategori
1	PA. Darul Aitam	Karangwuluh Rt 008 Rw 004, Temon.	C
2	PA. Ash-Shiddiqiyah	Sremo Tengah Rt 064 Rw 024 Hargowilis, Kokap	B
3	PA. Muhammadiyah Wates	Kriyanan, Wates, Kulon Progo	A
4	PA. Muh. Putra Daarusubusi	Beji Rt 007 Rw 004, Wates	A
5	PA. Mambaul Hisan	Banjaran Rt 074 Rw 022 Hargo, Mulyo, Kokap	C
6	PA. Muh.Pandowan	Diren Rt. 13/06, Pandowan Galur	D
7	PA. Yatim Dhuafa Al-Azhar	Pedukuhan V Tayuban, Panjatan	D
8	PA. Darul Ulum Muhammadiyah	Sorobayan, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo,	C
9	LKSA Panti Asuhan Muh Tuksono	Karang 7/4, Tuksono, Sentolo	A
10	Panti Asuhan Al Ikhlas	Ngrandu 36/18, Salam Rejo, Sentolo	B
11	LKSA Panti Asuhan Nurul Haromain	Taruban Kulon 29/15, Tuksono, Sentolo	D
12	PA Al Alimiyyah	Srikayangan 22/11, Sentolo	C
13	Panti Al Ghifari	Gentan, Sidorejo, Lendah	C
14	Panti Asuhan Sancta Maria	Semak35/18. Banjarasri, Kalibawang	B
15	Panti Asuhan Brayat Pinuji	Boro 01/01, Banjarasri, Kalibawang	B
16	Panti Werdha Santa Monika	Boro 01/01, Banjarasri, Kalibawang	C
17	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Nanggulan	Grubug 27/10. Jatisarono, Nanggulan	C
18	Panti Asuhan Bhakti Asih	Janti Kidul 68/24, Jatisarono, Nanggulan	C
19	Panti Asuhan Sang Timur	Karang 29/11. Jatisarono, Nanggulan	A
20	Panti Asuhan Muhammadiyah "Ahmad Sudjari" Girimulyo	Jonggrangan 91/22, Jatimulyo. Girimulyo	D
21	Yayasan Al-Islamy (Orsos)	Padaan Kulon 19/09, Banjarharjo, Kalibawang	A
22	PA. Ibnu Fatah	Karang Tengah Kidul, Margosari	C
23	Asrama SDLB Pengasih	Gotakan, Panjatan	-

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Tabel 6.6
 Organisasi Sosial (Orsos) yang bergerak di dalam bidang usaha kesejahteraan sosial
 Tahun 2019

1	Orsos Budhi Mulya.	Terbah Rt 013 Rw 006, Wates Kulon Progo	D
2	Orsos Bina Sejahtera	Kuwirun Rt 009 Rw 004, Kulwaru, Wates	Embrio
3	Orsos Langgeng.	Pedukuhan Seling Rt 021 Rw, 009, Temon	C
4	Orsos Rukun Agawe Santosa	Bugel VII, Panjatan	D
5	Orsos Mulya Laras	Rt 11 Rw 06 Depok, Panjatan	C
6	Orsos Ngudi Makmur	Rt 07 Rw 04 Panjatan, Panjatan	D
7	Orsos Ngudi Barokah	Rt 06 Rw 03 Kanoman, Panjatan	Embrio
8	Orsos Margo Mulyo	Dukuh IV Tayuban, Panjatan	Embrio
9	Orsos Mantep Mandiri	Dukuh Ix Bojong, Panjatan	-
10	Orsos Mulia	Salam Rejo 06/03, Sentolo	C
11	Orsos Marem	Pedukuhan Mendiro 48/22, Gulurejo, Lendah	D
12	Orsos Bina Insan Madani	Diran, Sidorejo, Lendah	C
13	Orsos Banjaroya Arso Gayuh Urip Sampurno	Slanden 15/08, Banjaroya, Kalibawang	D
14	Orsos KEBARU	Pengasih, Rt.03/01 Pengasih	-
15	Orsos Arum Mas	Karangtengah Lor, Rt.11/06 Margosari	D
16	Orsos Sumber Mas	Gunung Pentul RT. 37/17, Karang Sari	D
17	Orsos Lestari Mulyo	Kragon II Palihan Temon	-

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

4. *Karang Taruna*, adalah organisasi sosial kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri. Berdasar pendataan tahun 2019 terdapat 31 unit karang taruna yang aktif, terdiri dari Karang Taruna Desa 18 unit, Karang Taruna Kecamatan 12 unit dan Karang Taruna Kabupaten 1 unit.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarnya informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Di Kabupaten

Kulon Progo, tahun 2019 hanya terdapat 1 LK3, yaitu LK3 Lestari, yang beralamat di Beji, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates.

Program pemberdayaan sosial dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas PSKS diberbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar. Sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan Forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Tingkat Keaktifan PSKS di Kabupaten Kulon Progo dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.6
 Tingkat Keaktifan PSKS Tahun 2019

No	PSKS	Jumlah	Aktif
1	IPSM	15	15
3	TAGANA	155	155
4	KPK / TKSK	88	88
5	Pendamping dan Operator PKH	57	57
6	Fasilitator/Supervisor SLRT	94	94
7	Pendamping ASLUT/ASODK	34	34
8	Tenaga Pelopor Perdamaian	10	10
9	Satgas Kesetiakawanan Sosial	20	20
10	Forum Pant	23	23
11	Forum WKSMB	30	30
12	Forum Orsos	22	22
13	Karang Taruna	31	31
14	LK3	1	1
15	Pendamping KUBE	20	20
	JUMLAH	600	600

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial

b. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Menindaklanjuti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bahwa Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019 adapun Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
 Realisasi capaian SPM Bidang sosial Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Daerah	
		Target 2019	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4
1	Program Perlindungan Sosial		
	a Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
	b Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
	c Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
2	Program perlindungan sosial		
	a Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	100%

Berdasarkan Tabel diatas bahwa realisasi capaian SPM Tahun 2019 adalah 100%, itu berarti bahwa Pelaksanaan SPM di Kabupaten Kulon Progo pada Program Perlindungan sosial telah terlayani semua.

3) Prestasi Penyelenggaraan Urusan

Tahun 2019 ini ada beberapa prestasi yang diperoleh Dinas Sosial PPPA, khususnya Urusan Sosial, diantaranya adalah :

1. Juara II Tingkat Propinsi Kejuaraan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Berprestasi (TSKS);

2. Masuk 5 besar kejuaraan Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional untuk Karang Taruna Tunas Kemuning, Desa Brosot.

4) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kurangnya SDM Pendataan PMKS
- b. Kurangnya SDM dalam update data kemiskinan
- c. Masih kurangnya kapasitas (kemampuan dan sarana pendukung) pekerja sosial profesional, orsos, LSM, dan Karang Taruna untuk ikut serta dalam hal pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial;
- d. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa dalam rangka pengembangan model pelayanan sosial pada skala yang lebih besar hingga skala kecamatan dan kabupaten;

2) Solusi

- a. Rekrutmen SDM Pendataan PMKS
- b. Percepatan update data kemiskinan
- c. peningkatan sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pekerja sosial profesional, orsos, LSM, dan Karang Taruna untuk ikut serta dalam hal pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa dalam rangka pengembangan model pelayanan sosial pada skala yang lebih besar hingga skala kecamatan dan kabupaten. Meskipun pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial baik, berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih harus diatasi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini, yang dimaksud kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial, serta mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya adalah rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Realisasi Fisik, Keuangan dan SDM

1)	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		
	a)	Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 37.526.800,00 realisasi Rp 37.303.400,00 SDM: 3 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Peringatan Hari Ibu 1 kali
			: Koordinasi GOW 12 kali
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 17,01% terhadap cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Terkoordinasikannya dan terpadunya kegiatan lembagayang mainstrim gender
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
	b)	Peningkatan Peranan Wanita	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 30.171.800,00 realisasi Rp 29.485.600,00 SDM: 11 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Pembinaan kewirausahaan bagi perempuan miskin 10 desa
			: Pembinaan kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaanekonomi perempuan 12 kali
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 18,37% terhadap cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Terevaluasinya program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dan desa prima (perempuan Indonesia maju mandiri)
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	c)	Pembinaan Gerakan sayang Ibu (GSI)	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 27.091.000,00 realisasi Rp 26.513.400,00 SDM: 15 orang
		Keluaran	: Ekspose hasil karya kaum perempuan 1 kali

		(<i>outputs</i>)	
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 14,63% terhadap cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan
		Dampak (<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	d)	Penguatan Pengarusutamaan Gender	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 17.995.300,00 realisasi Rp 14.922.600,00 SDM: 25 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Laporan evaluasi PUG, PP dan PA 1 dokumen
			: Pelatihan PPRG dan ARG 1 kali
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan 10% terhadap capaian kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Terimplementasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	e)	Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 25.141.000,00 realisasi Rp 24.422.100,00 SDM: 28 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Data pilah gender dan anak dalam pembangunan 1 dokumen
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 17,01 % terhadap cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Terimplementasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	2)	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	
	a)	Pembinaan Kabupaten Layak Anak	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 29.730.675,00 realisasi Rp 29.404.400,00 SDM: 31 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Gugus tugas kabupaten layak anak 5 kali

			: Pembinaan kabupaten layak anak 9 kali
			: Forum anak kulon progo dan forum anak kecamatan 13 kali
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 6,89% terhadap cakupan perlindungan perempuan dan anak
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	b)	Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 196.158.800,00 realisasi Rp 195.978.700,00 SDM: 6 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak keluarga miskin 370 siswa
			: Pemenuhan Hak Anak 95 orang
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 42,55% terhadap cakupan perlindungan perempuan dan anak
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Terimplementasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	c)	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 77.283.756,00 realisasi Rp 76.859.406,00 SDM: 8 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Jumlah satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO 0 keluarga
			: Gugus tugas TPPO 13 kali
			: Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 36 orang
			: Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan `105 orang
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 15,31% terhadap cakupan perlindungan perempuan dan anak
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Peningkatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
	d)	Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban	

		Kekerasan	
		Masukan (<i>inputs</i>)	: Dana alokasi Rp. 61.851.500,00 realisasi Rp 60.916.500,00 SDM: 46 orang
		Keluaran(<i>outputs</i>)	: Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 12 kecamatan
			: Koordinasi FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan 13 forum
			: Kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 1 perbup
			: Pelatihan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat 220 orang
		Hasil (<i>outcomes</i>)	: Dukungan sebesar 13,01 % terhadap cakupan perlindungan perempuan dan anak
		Manfaat(<i>benefits</i>)	: Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
		Dampak(<i>impacts</i>)	: Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

2. Realisasi Program dan Kegiatan

3. Realisasi Urusan

Secara terperinci capaian sasaran kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut indikator kinerja program pada RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9

Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2019

No	Uraian	2018	2019	
		Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	28	30	34
2.	Jumlah OPD	42	42	42
3.	Jumlah desa yang melaksanakan PUG	-	-	4
4.	Jumlah Desa	-	87	87
5.	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif	34	34	34
6.	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34	34	34
7.	Jumlah pekerja perempuan	114.295	115.515	115.636
8.	Jumlah angkatan kerja perempuan	150.024	151.000	150.415
	Capaian indikator kinerja program	80.95	61,73	65,81

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat Capaian indikator kinerja program tahun 2018 sebesar 80,95 %, yang merupakan Capaian dari Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Realisasi Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender tahun 2019 dari target 61.73 tercapai sebesar 65.81. jadi tingkat capaian realisasi terhadap target 106.61% Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender, Peningkatan Peranan Wanita, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2019 adalah 30, tercapai 34 OPD. Tahun 2018 pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender telah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kulon Progo berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama yang diterimakan

pada tanggal 19 Desember 2018 di Istana Wakil Presiden, Pelaksanaan evaluasi tahun 2019 tidak ada karena pelaksanaan tersebut diselenggarakan dua (2) tahun sekali.

Tahun 2018 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Peningkatan Peranan Wanita, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) desa dan pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 5 (lima) desa tersebut yaitu :

- a. Desa Ngentakrejo , Kecamatan Lendah,
- b. Desa Bumirejo Kecamatan Lendah
- c. Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo
- d. Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, dan
- e. Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Desa Pendoworejo

Selanjutnya, Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi APE 2018 yang dilakukan adalah meningkatkan penerapan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penyusunan perencanaan responsive gender dan anggaran responsive gender .
2. Menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
3. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
4. Peran serta Perempuan dalam Pembangunan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Tabel 2.11
 Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2019

No	Uraian	2019	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah OPD yang telah melaksanakan ARG	30	34
2.	Jumlah OPD	42	42
3.	Jumlah lembaga perempuan dan	34	34

anak yang aktif		
4.	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34 34

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2019

Data pilah adalah data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta berdasarkan usia anak dan dewasa. Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Tahun 2019 ditargetkan ada 30 OPD yang sudah dapat menyediakan data pilah dan dari target tersebut dapat dipenuhi. Dari target tersebut sudah dipenuhi 34, melebihi dari target.

Tahun 2018, ditargetkan ada 30 dari 42 OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG, terealisasi 34 OPD yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel

OPD Yang Melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2019

No	Nama OPD
1	Dinas Sosial PPPA
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	Dinas Perhubungan
5	Dinas Komunikasi dan Informasi
6	Dinas Kebudayaan
7	Dinas Pariwisata
8	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
10	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB
15	RSUD Wates
16	RSUD Nyi Ageng Serang
17	Kelurahan Wates
18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Sekretariat DPRD
20	Inspektorat
21	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
22	Badan Keuangan dan Asset Daerah
23	Kecamatan Samigaluh
24	Kecamatan Kalibawang
25	Kecamatan Nanggulan
26	Kecamatan Girimulyo
27	Kecamatan Sentolo

28	Kecamatan Kokap
29	Kecamatan Pengasih
30	Kecamatan Lendah
31	Kecamatan Galur
32	Kecamatan Panjatan
33	Kecamatan Wates
34	Kecamatan Temon

Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Anggaran responsif gender ini diukur dari proses perencanaan yang responsif gender berdasarkan pada analisis gender menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)* yang kemudian dituangkan dalam *Gender Budget Statement (GBS)* atau Pernyataan Anggaran Gender yang dilampirkan dalam usulan kegiatan dan RKA SKPD Capaian tersebut karena telah dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan Perencanaan dan penganggaran responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender (PPRG dan ARG) dan *Gender Budget Statement (GBS)* bagi SDM perencanaan untuk semua SKPD yang didukung dengan pelayanan Ruang Informasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

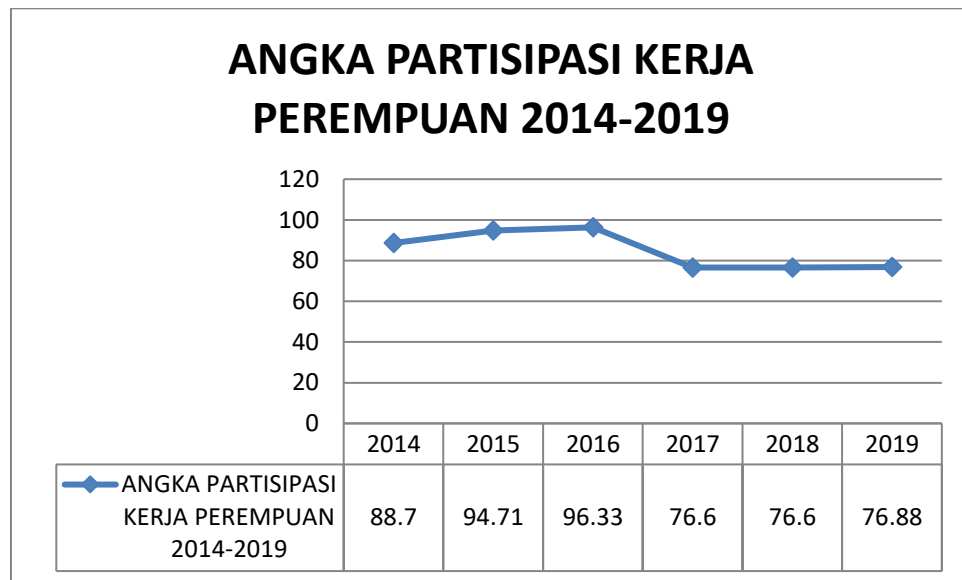
Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 organisasi perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI.

Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan GOW untuk mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan.

Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2



Sumber data: Dinas Dukcapil 2019 dan Dinas Nakertrans 2019

Partipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2018-2019. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan. Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan dari 3 tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya.

Menurut data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2019, peran perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati dibandingkan laki-laki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak
 Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Sektor	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/ Pekebun	50.951	55.588	52.514	55.874
2	Wiraswasta	29.340	19.190	33.031	25.755
3	Karyawan Swasta	25.376	18.051	29.591	23.239
4	Buruh Harian Lepas	10.182	4.027	12.834	4.494
5	Pegawai Negeri Sipil	4.841	3.464	4.570	3.481

Sumber data: Dinas Dukcapil 2019 (Semester 2)

Berdasarkan data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan, wiraswasta, karyawan swasta, buruh harian lepas, dan PNS. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dan wiraswasta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya seperti pengembangan industri rumahan bagi kaum perempuan.

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2019

No	Uraian	2018	2019	
		Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	133	105	131
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	133	105	131
3.	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak	3	6	6
4.	Jumlah seluruh Kecamatan	12	12	12
5.	Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan	-	40	40
6.	Jumlah desa dan kelurahan	-	88	88
7.	Jumlah KDRT	44	50	29
8.	Jumlah Keluarga	149.839	149.900	149.976
	Capaian indikator kinerja program	74,99	68,63	68,63

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2018

Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2019 dari target sebesar 68,63 % telah tercapai sebesar 68,63 %. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Target pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2019 adalah 105 kasus dan tercapai 131 kasus. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terlayannya kasus kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan

terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta kerjasama yang baik dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY. Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10

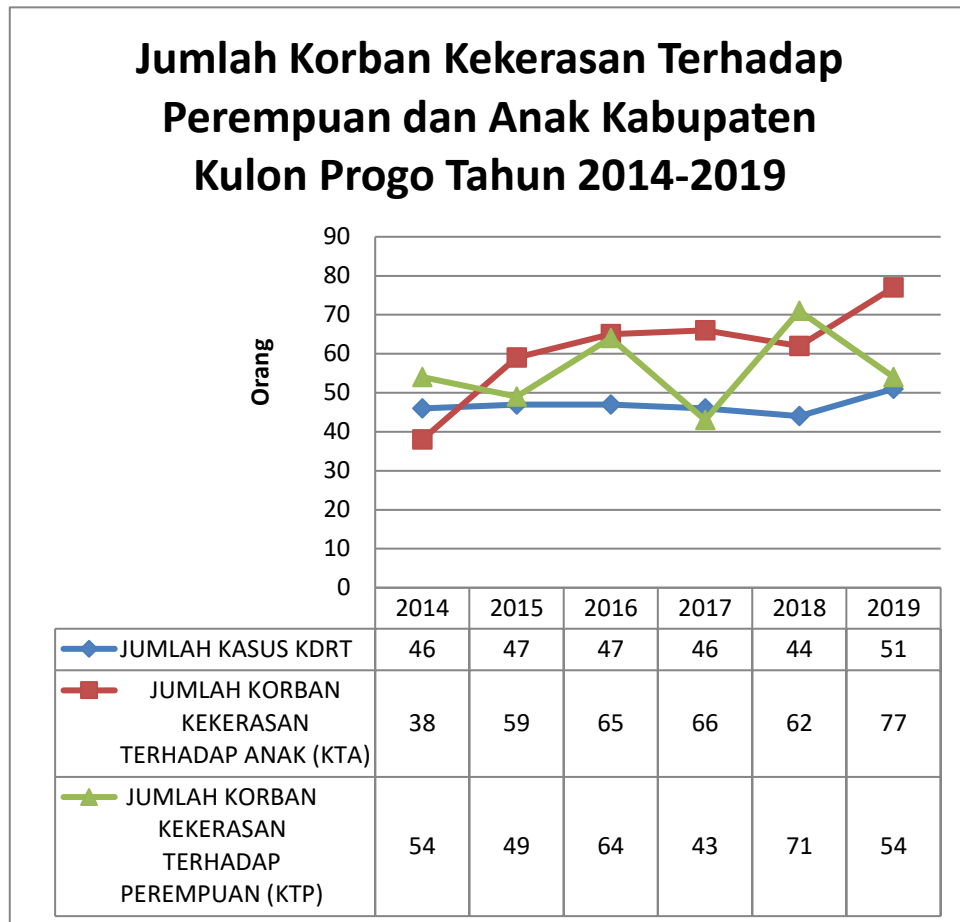
**JUMLAH KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
 MENURUT JENIS LAYANAN
 TAHUN 2019**

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus Kasus Baru		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	16	13	29
2	RSUD Wates	3	5	8
3	Dinas Kesehatan	7	3	10
4	P2TP2A	21	42	63
5	Dinsospppa (Peksos)	4	13	17
6	RS.Risky Amalia Medika	1	0	1
7	RS PKU Muh Nanggulan	2	1	3
	Jumlah Kasus Baru	54	77	131

Sumber data : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Sedangkan dilihat dari *trend* kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 - 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.



Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Dari grafik tersebut diatas maka secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, angka kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga meningkat. Jenis kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah kekerasan psikis 23 kasus, pencabulan 22 kasus, kekerasan fisik 12 kasus, penelantaran 11 kasus, pelecehan seksual 4 kasus, perkosaan 3 kasus, dan eksploitasi 2 kasus. Sedangkan jenis kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik 22 kasus, kekerasan psikis 16 kasus, pencabulan 6 kasus, perkosaan 3 kasus, pelecehan seksual 3 kasus, penelantaran 3 kasus, dan eksploitasi 1. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah korban tersebut sejatinya masih lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara melapornya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPPK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh

peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa . Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan.

Pencapaian target dari Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2019 juga di dukung oleh kegiatan Pembinaan Kabupaten Layak Anak dan Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah.

Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Tahun Penetapan Kecamatan Layak Anak
1	Kokap	2013
2	Nanggulan	2014
3	Girimulyo	2015
4	Pengasih	2015
5	Wates	2016
6	Sentolo	2017
7	Kalibawang	2018
8	Girimulyo, Samigaluh, Galur, Panjatan, dan Temon	2019

Tahun 2019, penetapan Desa dan Kelurahan sebagai Desa dan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Kulon Progo memiliki target 40 desa dan kelurahan, dan terealisasi keseluruhan

Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS) tahun 2019 di 2 kecamatan yaitu kecamatan samigaluh dan kecamatan nanggulan untuk 370 anak bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan gizi anak yang berpengaruh terhadap semangat dan motivasi belajar anak. Menurut laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dari 23 SD/MI yang menerima PMTAS , maka secara umum diperoleh hasil sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya minat belajar anak dan meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik SD/MI dalam mengikuti kegiatan belajar;
- (2) Siswa mengenal dan mengetahui manfaat makanan olahan dari bahan lokal serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat
- (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal.
- (4) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13

Capaian SPM Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
				2018	2019	
					Target	Realisasi
1	Penanganan Pengaduan/ Laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengasuan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu	%	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
				2018	2019	
					Target	Realisasi
		di rumah sakit				
3.a	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT	%	100	75	100
3.b		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu	%	100	75	100
4.a	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	80	100
4.b		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	50	100
5.a	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	50	0

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
				2018	2019	
					Target	Realisasi
	kekerasan					
5.b		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	80	100

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2019

Secara terperinci nilai capaian SPM tersebut diatas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- 1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu:

$$\frac{\sum \text{Pengaduan/Lap. yg ditindak lanjuti } ^1)}{\sum \text{Pengaduan /Lap. yg masuk } ^2)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{131}{131} \times 100\% \\ &= 100 \end{aligned}$$

- 2) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT:

$$\frac{\sum \text{korban KtP/A yg memperoleh layanan kesehatan } ^1)}{\sum \text{seluruh korban KtP/A yg terdata datang di Puskesmas } ^2)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{19 \text{ Orang}}{19 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- 3) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT :

$$\frac{\sum \text{korban kekerasan yg memperoleh pelayanan rehabsos } ^{11)}}{\sum \text{korban kekerasan yg membutuhkan rehabsos } ^{12)}} \times 100\%$$

$$= \frac{14 \text{ orang}}{\quad} \times 100\%$$

$$= \frac{14 \text{ orang}}{14 \text{ orang}} \times 100\%$$

- 4) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Unit Pelayanan Terpadu:

$$\frac{\sum \text{korban kekerasan yg mendpt pelayanan bimb. rohani}^{15})}{\sum \text{korban kekerasan yg membutuhkan pel. bimbingan rohani}^{16})} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ orang}}{0 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- 5) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak:

$$\frac{\sum \text{Perkara yg diputuskan pengadilan}}{\sum \text{Perkara kekerasan thd peremp. \& anak yg disidangkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{9 \text{ orang}}{9 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- 6) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum:

$$\frac{\sum \text{korban yg mendpt layanan bantuan}^{33})}{\sum \text{korban yg membutuhkan layanan}^{34})} \times 100\%$$

$$= \frac{9 \text{ orang}}{9 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- 7) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan:

$$\frac{\sum \text{perempuan \& anak korban kekerasan yg mendpt pelayanan pemulangan}^{37})}{\sum \text{perempuan \& anak korban kekerasan yg tercatat di UPT}^{38})} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ orang}}{0 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

- 8) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan:

$\frac{\sum \text{perempuan \& anak korban kekerasan yg disatukan kembali ke keluarga}^{39})}{\sum \text{korban yg membutuhkan reintegrasi sosial}^{40})} \times 100\%$

$$= \frac{0 \text{ Orang}}{0 \text{ orang}} \times 100 \%$$

$$= 0 \%$$

Dari indikator SPM tersebut diatas, ada indikator yang belum mencapai target SPM yaitu Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan capaian sebesar 0 % seharusnya minimal 50 %. Kondisi ini dikarenakan korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan pemulangan dari luar negeri ke Kulon Progo pada tahun 2019 tidak ada sehingga tidak ada pelayanan. Pemulangan yang dimaksudkan dalam SPM ini adalah pemulangan korban kekerasan contohnya TKW dari luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan BP2TKI yang berada di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten tidak ada BP2TKI.

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2019 ini telah dilaksanakan diversi sebanyak 3 kasus anak yang melibatkan 9 anak. Menurut data dari Kepolisian Resor Kulon Progo penerapan diversi sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala baik dari instrumen pelaksana undang undang maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan diversi itu sendiri.

Prestasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diperoleh pada tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Penghargaan Anugrah Kabupaten Layak Anak **Tingkat Madya** masih sama dengan tahun 2018 yaitu penghargaan bagi Kabupaten yang berkategori Layak Anak yang telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak.
- 2) Penghargaan APE (Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya) naik satu peringkat yaitu dari Tingkat Madya menjadi Tingkat utama tahun 2018 pada tahun 2019 tidak ada penyelenggaraan tersebut baru 2020 akan dilaksanakan kembali.

4.1.2.2. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum semua elemen memahami tentang pentingnya KLA.
- b) Kurangnya SDM yang memahami tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan SDM Konselor
- c) Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.

- d) Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual .
- e) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak Masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas lainnya.

2) Solusi

- a) Sosialisasi tentang KLA
- b) Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA)
- c) Sosialisasi dan advokasi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan SKPD terkait baik menggunakan dana pemerintah maupun bekerjasama dengan LSM, lembaga masyarakat maupun swasta.
- d) Optimalisasi pelayanan P2TP2A dengan menyediakan konselor hukum, psikologi, kesehatan dan rohani sesuai kebutuhan korban serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dan Forum Penanganan Korban kekerasan (FPKK) DIY serta mengaktifkan peran FPKK tingkat kecamatan dan desa.
- e) Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

BAB III

PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 merupakan akuntabilitas dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran, program serta kegiatan OPD. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan, serta bisa menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi LPPD pada masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan kesejahteraan sosial sehingga visi dan misi dinas dapat segera terwujud.

Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan kebijakan yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kebijakan dalam pembangunan bidang sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Wates, Januari 2019

Kepala Dinas



Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

EVALUASI HASIL PROGRAM RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJM pada Tahun 2017 (Akhir Periode RPJM)		Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan IV RKPD Tahun 2019 (sesuai capaian APBD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan IV Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJM s.d Triwulan IV Tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			4		5		6		7		8		9		10		11		12=11/6		13=5+11		14=13/4			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06 Sosial																										
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	214,113,250	20	228,364,065	100	339,951,060	5	59,849,047	10	148,401,957	15	234,515,946	20	336,778,821	100	336,778,821	100	99.07	100	565,142,886	0	2.6394578	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	100	66,591,350	20	48,557,500	100	52,799,450	5	8,844,150	10	22,148,650	15	33,400,600	20	51,378,500	100	51,378,500	100	97.31	100	99,936,000	0	1.5007355	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.14	Program Peningkatan Sarana/Prasana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Capaian peningkatan sarana/prasana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD (%)	100	544,850,175	20	854,069,920	100	433,915,200	5	151,176,681	10	247,586,178	15	295,980,716	20	409,562,414	100	409,562,414	100	94.39	100	1,263,632,334	0	2.3192290	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.24	Program Pemberdayaan Sosial	Indeks Pemberdayaan Sosial (Nilai)		340,920,500	40	894,211,513	84.00	1,008,171,000	0	65,171,463	0	462,106,663	0.3	653,685,863	43	981,556,463	84.14	981,556,463	100.17	97.36	43.3	1,875,767,976	0	5.5020686	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.06.1.06.01.01.25	Program Perlindungan Sosial	Indeks Perlindungan Sosial (Nilai)	79.7	2,117,429,950	47	1,223,143,350	40.06	1,441,787,556	7.9	214,150,100	11	650,314,864	18	996,049,744	84	1,353,670,484	43.3	1,353,670,484	108.09	93.89	84.14	2,576,813,834	0	1.2169535	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)																		101.65	96.40			2.64				
Predikat Kinerja																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM								3,276,624,266	499,191,441	1,530,558,312	2,213,632,869	3,132,946,682	3,132,946,682	6,381,293,030												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM																										
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM																										

IKK 3.2

No IKK	IKK	Urusan	2019
1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
		Sosial	2
2	Keberadaan SOP	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
		Sosial	8
3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8
		Sosial	4
4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
		Sosial	12
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
		Sosial	12
6	Rasio PNS Kabupaten	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11
		Sosial	24
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
		Sosial	10
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
		Sosial	12
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ada
		Sosial	
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
		Sosial	5
11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
		Sosial	5

12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
		Sosial	5
13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	502,950,631
		Sosial	5,665,637,270.92
14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	495,806,106
		Sosial	5,448,422,650
15	Total Belanja Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	502,950,631
		Sosial	3,276,624,266
16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Sosial	2,389,012,004.92
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ada
		Sosial	
18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ada
		Sosial	
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ada
		Sosial	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Web site 2. Papan Pengumuman 3. Pos Pengaduan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ada
		Sosial	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ada
		Sosial	

Mengetahui
Kepala,
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo

Drs. Yohanes Irianta, M.Si
NIP. 19630527 198903 1 005

IKK 3.3

	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	2019		OPD
					PERHITUNGAN	CAPAIAN	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN WAJIB							
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti => (367+1685+5205+10+16) ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan => (7283)	7,283 ----- x 100 % 7,283	100	Dinas Sosial P3A
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran => (0) ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten => (0)	0 ----- x 100 % 0	0	Dinas Sosial P3A
		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- x 100 % Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	0 ----- x 100 % 7283	0	Dinas Sosial P3A
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga => (9) ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga => (9)	9 ----- x 100 % 9	100	Dinas Sosial P3A
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada => (600) ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina => (7,283)	600 ----- x 100 % 7283	8.238363312	Dinas Sosial P3A
					2019		

	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN	OPD
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	75	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD (803.049.540.779,24)}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD (872.040.848.107,24)}} \times 100\%$	$\frac{803,049,540,779.24}{872040848107,24} \times 100\%$	#VALUE!	Dinas Sosial P3A
		76	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi => (77)}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) => (108.352)}} \times 100\%$	$\frac{77}{108,352} \times 100\%$	0.07	Dinas Sosial P3A
		77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan => (54)}}{\text{Jumlah penduduk perempuan => (225.947)}} \times 100.000$	$\frac{54}{225,947} \times 100.000$	0.02	Dinas Sosial P3A
		78	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yng terlayani => (54)}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan => (54)}} \times 100\%$	$\frac{54}{54} \times 100\%$	100	Dinas Sosial P3A
		79	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan => (115.636)}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan => (150.415)}} \times 100\%$	$\frac{115,636}{150,415} \times 100\%$	76.88	Dinas Sosial P3A